

BAB IV

ABDURRAHMAN WAHID DAN MUKTAMAR NU KE 27 TAHUN 1984

SITUBONDO

A. Peran Abdurrahman Wahid Dalam Proses Menuju Muktamar NU ke 27 Tahun 1984 Di Situbondo

Seperti yang telah diungkapkan penulis sebelumnya bahwa Abdurrahman Wahid masuk ke dalam organisasi NU setelah mendapat tiga kali permintaan dari kakeknya, kyai Bisri Syansuri. Ia diminta oleh kakeknya untuk masuk kedalam jajaran Dewan Syariah Nasional NU dan menyanggupinya setelah mendapat nasehat dari ibunya, nyi Sholichah. ia kemudian masuk kedalam Dewan Syariah NU bersama kakeknya kyai Bisri Syansuri. Pada muktamar NU yang ke 27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur Abdurrahman Wahid diangkat menjadi ketua dewan Tanfidziah NU.

Meski Abdurrahman Wahid memimpin organisasi ini sejak tahun 1984 melalui pengangkatan pada Muktamar Situbondo, empat tahun sebelumnya bahkan Abdurrahman Wahid sudah aktif berperan dalam pengembalian arah tujuan organisasi NU yang sudah melenceng dari tujuan awal didirikannya. Akhir dekade 70-an adalah periode awal Abdurrahman Wahid masuk dalam dunia politik khususnya pada organisasi NU yang pada saat itu sedang mengalami konflik di PPP dan konflik internal di kubu NU sendiri seperti yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang masalah.

Konflik itulah yang kemudian menyebabkan NU keluar dari hinggar bingar politik nasional dan kemudian menyatakan diri kembali ke NU 1926 atau yang lebih dikenal dengan istilah kembali ke Khittah NU 1926. Tidak hanya itu, NU kemudian juga menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang juga disahkan pada Muktamar ke 27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur. Gagasan untuk kembali ke Khittah 1926 sebenarnya telah dilontarkan semenjak muktamar tahun 1959 di Jakarta. Akan tetapi gagasan tersebut sulit terealisasi karena mendapat respon yang kurang baik dari para elit NU yang didominasi oleh politisi. Barulah pada penghujung tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, setelah berbagai konflik dalam ranah eksternal maupun internal partai, para tokoh NU mulai mengambil langkah-langkah kembali ke Khittah 1926.

Dimulai dari muktamar NU di Semarang tahun 1979 yang secara organisatoris telah mengambil langkah untuk melaksanakan kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang lebih menyentuh pada umat. Selain itu juga dilakukan perubahan AD/ART dari sebagai partai politik menjadi jamiyah diniyah (organisasi keagamaan) yang memang menjadi identitas berdirinya. Akan tetapi program-program pembangunan masyarakat, sosial dan keagamaan yang telah disusun dalam muktamar tersebut tidak terealisasi. Tidak terealisasinya program-program tersebut nampaknya dikarenakan tokoh-tokoh NU yang diharapkan dapat menangani program-program tersebut kurang memiliki waktu untuk memfokuskan diri dalam pelaksanaan program karena kesibukan mereka dalam urusan politik di

PPP. Selain itu, keaktifan di partai membuat para tokoh mapan dan terjamin dalam segi ekonomi dibandingkan hanya fokus mengurus NU. Kesadaran-kesadaran akan terbengkalainya dan melencengnya tujuan awal didirikannya NU dimulai dibenahi tahun 1979-1984 yang diawali muktamar Jakarta. Oleh sebab itu masa tahun 1979-1984 adalah sebagai masa transisi NU karena mulai kembali pada tujuan awal didirikannya organisasi dan munculnya tokoh generasi ketiga NU yang akan mengambil alih kepemimpinan tokoh generasi kedua.¹²¹

Jika pada awalnya kehadiran politik dalam tubuh NU merupakan perluasan wawasan dan orientasi gerakannya, ternyata pada perkembangan berikutnya menjadi berbeda. Orientasi kedalam politik praktis malah menjadi perhatian di atas segala-galanya. Kesadaran akan melencengnya tujuan itu lah yang kemudian menjadi salah satu alasan NU untuk kembali ke garis awal didirikannya yaitu Khittah 1926. Dalam hal ini, Abdurahman Wahid, dikenal sebagai salah satu tokoh dan konseptor dari Khittah 1926 tersebut.

Ditengah perjalanan NU yang tak lepas dari gejolak konflik itu, menjadikan kalangan intelektual muda NU merasa prihatin. Sejumlah kalangan muda dan orang-orang yang berfikiran reformatif berlatar belakang elit NU, berupaya mengatasi krisis tersebut. Misuo Nakamura menyebut kaum muda tersebut masuk dalam jajaran kelompok progresif. Kelompok ini seperti Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, dan kiai Sahal Mahfudh, serta kiai-kiai

¹²¹ Laode Ida, *Dinamika Internal Nahdlatul Ulama Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Tesis, Universitas Indonesia, 1995), 136-137.

muda lain yang berada dalam lingkaran program pengembangan masyarakat berbasis pesantren yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian ilmu sosial Islam liberal, atau yang terkenal dengan LP3ES. Organisasi tersebut adalah organisasi non pemerintah yang berupaya menjadikan pesantren sebagai basis kerja pengembangan masyarakat pedesaan dimana anggota NU yang setuju dengan pembaharuan dan peduli terhadap masalah tersebut bergabung dalam kelompok ini yang kemudian mendiskusikan bagaimana NU dapat menjadi semakin relevan bagi kehidupan banyak masyarakat pedesaan yang diwakilinya.¹²²

Kegiatan-kegiatan dalam lembaga tersebut sangat penting dilakukan dalam usaha menghilangkan kekhawatiran dalam pikiran generasi muda NU berkenaan dengan pengalaman pahit dari keterlibatan NU sebagai organisasi dalam kancah politik sejak tahun 1952 hingga 1984, suatu periode dengan banyaknya terjadi manipulasi atas organisasi demi kepentingan pribadi sebagian politisi NU. Keinginan untuk membawa NU kembali ke dalam bentuk semula, serta aktif terlibat kembali dan bertanggung Jawab terhadap kepentingan masyarakat, berkembang luas dikalangan kiai dan santri NU, bahkan di lingkungan jamaah NU secara keseluruhan yang akhirnya melahirkan tekad untuk kembali ke Khittah1926.¹²³

¹²² Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: Lkis, 1994), 132.

¹²³ Djohan Effendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi Wacana Keagamaan Dikalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2010), 8.

Mereka menganggap bahwa institusi-institusi islam tradisional terancam jatidirinya dalam Indonesia modern dan pembangunan ekonomi merupakan tujuan yang diterima secara luas. Para peneliti LP3ES melihat pesantren sebagai lembaga unik yang bisa menjadi pusat-pusat usaha pengembangan ekonomi karena pentingnya kiai sebagai pemimpin masyarakat dan pesantren sebagai sistem ekonomi. Mereka berharap membalik basis pedesaan NU menjadi gerakan sosial seperti Muhammadiyah. Selain itu mereka juga menyakini bahwa pada akhirnya lebih penting para anggota NU untuk menjadi anggota KUD (Koperasi Unit Desa) dari pada menjadi parlemen. Kaum progresif ini secara prinsipil juga mendukung keluarnya NU dari dunia politik praktis dan secara terbuka menyambut gerakan Naro sebagai dalih keluar dari PPP. Menurut mereka anggota NU harus bebas memilih partai politik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang tetap bertahan di PPP hanyalah orang yang memiliki posisi formal di dalam pemerintahan dan ambisi-ambisi pribadi mereka akan terhalangi jika NU keluar dari PPP.¹²⁴

Nampaknya pemikiran para tokoh muda progresif tersebut sesuai dengan tujuan makna pengembalian NU kepada jalur Khittah 1926. Dalam tujuan awal pendiriannya NU yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Srwt, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Dengan NU keluar dari kesibukan dalam politik

¹²⁴Greg Fealy dkk, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 166.

praktis akan bisa menjadikan NU fokus terhadap pengembangan masyarakat melalui banom-banom NU yang sempat terbengkalai. Dengan perhatian penuh terhadap masalah pengembangan masyarakat tersebut diharapkan NU akan lebih bisa berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang spiritual maupun sosial.¹²⁵

Krisis kepemimpinan yang terjadi di awal tahun 1980-an memberikan kesempatan kepada para pembaharu muda NU untuk mengisi kekosongan yang ada serta untuk menjadikan gagasan-gagasan yang telah mereka diskusikan sebelumnya diterima dalam arus besar pemikiran kaum *nahdliyyin*. Pada waktu itu pemimpin yang paling menonjol dari kelompok pembaharu muda ini adalah Abdurrahman Wahid yang bekerja sama dengan teman-temannya seperti Fahmi Saifuddin, kiai Mustofa Bisri serta Dr Muhammad Thohir. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa mereka memainkan peranan dalam pemilihan kiai Ma'sum sebagai Rais A'am pada tahun 1981 menggantikan kiai Bisri yang meninggal

¹²⁵Gagasan atau keinginan untuk keluar dari politik serta kembali ke khittah asli telah dikemukakan sejak muktamar tahun 1971 dan berulang kali setelah itu. Sedangkan gagasan untuk kembali kepada khittah asli pertamakali dibicarakan dan disetujui pada muktamar 1979. Akan tetapi pada saat itu belum ada konsep tentang bagaimana NU kedepan setelah kembali ke khittah apalagi bagaimana konsep menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Akan tetapi implikasi-implikasi penting yang nampak pada saat itu adalah agar kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial-ekonomi diberikan prioritas lebih besar dari sebelumnya. (Martin Van Bruinessen, 129) Konsep kedepan itulah yang kurang bisa di gambarkan oleh ulama senior NU termasuk Achmad Siddiq yang dikenal sebagai penggagas atau yang mendengungkan pertama kali konsep khittah dalam buku kecil pada muktamar tahun 1979. Kemudian Gus Dur dan kawan-kawan sesama ulama muda yang peduli akan hal itu berusaha ikut berperan dalam rangka mengembalikan NU pada jalur khittah serta menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Mereka kemudian membentuk Tim Tujuh yang melakukan langkah-langkah penting untuk mewujudkan konsep yang lebih tertata dalam merealisasikan keinginan kembali ke Khittah 1926 serta menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Tim tersebut memasukkan beberapa pikiran dari KH. Achmad Siddiq, namun kemudian dipadukan dengan pikiran-pikiran mereka.

dunia. Hal inilah yang pertama kali mereka lakukan untuk menyelesaikan konflik internal dalam tubuh partai setelah kosongnya posisi Rais A'am sepeninggal kiai Bisri Syansuri.

Kiai Ali Ma'sum adalah Rais A'am pertama yang bukan berasal dari kalangan *founding fathers* NU. Ia bukanlah figur nasional dan tidak mempunyai pengalaman politik sebagaimana pendahulunya. Ia juga bukan berasal dari Jawa Timur. Alasan mengapa kiai Ali Ma'sum terpilih adalah selain karena kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo menolak jabatan ini pada saat itu dengan alasan sudah lanjut usia (kiai Syamsul Arifin adalah generasi *founding fathers* yang tersisa saat itu dan mempunyai geneologi intelektual ke kiai Hasyim Asy'ari). Faktor yang tak kalah berpengaruh dalam terpilihnya kiai Ali Ma'sum adalah "gerilya politik" kalangan muda (dimotori Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifudin, Mustofa Bisri) untuk mendudukkan sosok Rais A'am yang tidak telalu politis dan yang menyukai gagasan modernitas. Satu-satunya yang menopang otoritas kiai Ali adalah posisi geneologis sebagai anak kiai Ma'sum Lasem, salah satu pendiri NU, juga anak menantu kiai Munawir Krpyak Yogyakarta, seorang kiai besar yang ahli dalam bidang ilmu bacaan Al-Qur'an.¹²⁶

Strategi ini memang cerdas, secara perlahan kiai Ali mengemudikan NU menjauh dari nuansa politik. Hal itu ditandai dengan sikapnya yang tidak mau duduk dalam Majelis Suro PPP (posisi yang dahulu diduduki kiai Bisri). Sikap kiai

¹²⁶ As'ad Said Ali, *Pergolakan Di Jantung Tradisi NU Yang Saya Amati* (Jakarta: LP3ES, 2008), 59.

Ali ini cukup tepat, paling tidak sebagai peringatan kepada PPP bahwa NU secara pasti akan meninggalkan partai itu. Sikap ini seolah melapangkan jalan bagi Naro untuk melakukan pembersihan terhadap tokoh-tokoh NU yang dianggap radikal, sebagai mana yang dikehendaki oleh Orde Baru. Dalam gerbong terakhir pembersihan ini, yang tersingkir adalah politisi NU seperti kiai Yusuf Hasyim dan Imron Rosadi. Krisis politik yang dialami oleh tokoh-tokoh “NU politik”¹²⁷ segera dimanfaatkan oleh aliansi ulama dan generasi muda NU untuk mengkampanyekan pentingnya keluar dari politik praktis.¹²⁸

Bersamaan dengan itu, para intelektual muda NU tetap berdiskusi dengan mengundang beberapa kiai lain, para intelek muda, serta aktifis pengembangan masyarakat. Pada pertengahan tahun 1983 mereka mendirikan forum untuk mendiskusikan perubahan-perubahan yang dianggap perlu untuk NU.¹²⁹ Berbagai diskusi dalam forum tersebut berhasil memunculkan gagasan-gagasan yang terus mengevaluasi perjalanan organisasi sosial Islam terbesar ini. Gagasan terbesar yang dipelopori tokoh muda NU adalah untuk mengembalikan NU pada Khittah 1926 yang terekpresikan dalam pertemuan-pertemuan mereka yang tidak resmi. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta tanggal 12 Mei 1983 dalam sebuah majelis

¹²⁷ Ulama NU yang cenderung terjun dalam bidang politik dari pada mengurus organisasi.

¹²⁸ Ibid., 59.

¹²⁹ Greg Fealy dkk, Greg Fealy dkk, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, 230.

yang kemudian dikenal dengan “Majelis Dua Puluh Empat”. Nama tersebut diambil karena pada waktu itu yang hadir sebanyak dua puluh empat orang.¹³⁰

Dalam pertemuan yang bersejarah itu, Majelis 24 mendiskusikan berbagai pemikiran-pemikiran dan gagasan untuk diajukan kelompok pembaharu pada munas yang akan datang. Berbagai aliran pemikiran terwakili dalam Majelis 24 ini. Kedua puluh empat peserta diskusi tersebut antara lain Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin dan kiai Mustofa Bisri, Dr. Muhammad Thohir, Sahal Mahfudh dan kiai Muchith Muzadi dari Jember (sering bertindak sebagai sekretaris KH Achmad Siddiq dan dipercaya banyak orang sebagai orang yang bertanggung Jawab atas bagian perumusan Khittah Nahdliyah Achmad Siddiq) M. Zamroni (mantan aktifis mahasiswa), Mahbub Junaidi (wartawan dan juga politisi), Abdullah Syarwani dan Said Budairi (keduanya aktifis organisasi non politik), Slamet Efendi Yusuf dan Masdar Farid Mas’udi (pemimpin mahasiswa dan pemikir muda NU yang paling menjanjikan). Selain itu peserta lainnya adalah Asip Hadi Pranata, M. Tholhah Hasan, HM. Munasir, Saiful Mudjab, Umar

¹³⁰Gagasan untuk kembali ke Khittah 1926 pada saat itu memang terus bergulir. Pertemuan 24 tokoh muda NU dan terbentuknya Tim Tujuh tahun 1983 di Jakarta, lebih mengorganisir berbagai keinginan untuk mengembalikan NU pada garis perjuangan awalnya, sebagai organisasi jamiyah yang secara formal terlepas dari PPP. Tokoh muda ini lebih berperan sebagai pengorganisir ide-ide, karena dua alasan: pertama, gagasan untuk kembali ke khittah sudah muncul jauh sebelumnya, yakni mulai tahun 1959 dalam muktamar NU di Jakarta. Kemudian bergulir lagi tahun 1971 dalam muktamar NU ke 25 di Surabaya yang justru pada waktu itu benar-benar menjadi partai politik. Kedua, gagasan untuk kembali ke khittah 1926 bukanlah semata-mata murni gagasan dari tokoh muda meskipun memang para tokoh muda tersebut sejak tahun 1970-an sering mengadakan pertemuan informal untuk membicarakan nasib dan dampak atas kiprah NU dalam berpolitik. Namun hal itu sudah menjadi bahan pemikiran para kiai terutama yang tidak berkiprah dalam politik praktis. Laode Ida, *Dinamika Internal Nahdlatul Ulama Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, 117.

Basalim, Cholil Musaddad, Gaffar Rahman, Ichwan Sjam, Musa Abdillah, Musthofa Zuhad, Danial Tanjung, dan Ahmad Bagdja. Para peserta yang disebutkan diatas kebanyakan adalah teman dari Abdurrahman Wahid.¹³¹

Majelis 24 atau bisa juga disebut forum 24 menyadari dan kemudian sependapat bahwa tiga dekade masa politik praktis telah mengabaikan perhatian NU terhadap fungsi sosial, ekonomi dan keagamaan yang seharusnya menjadi perhatian organisasi. Bahkan oleh Majelis 24, khidmat politik praktis yang disebut bertujuan untuk umat, dinilainya hanya sebuah slogan kosong. Menurut Ahmad Nurhasim, hal tersebut memang bisa dibenarkan, karena ketika terlibat dalam politik praktis, NU hanya mengurus soal kursi DPR, perebutan jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan, terus terjadi konflik-konflik politik, dan kerugian-kerugian politik lain yang diakui sering membuat garapan besar NU dalam bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan menjadi terabaikan. Refleksi perpolitikan NU yang banyak berkhidmat kepada politik praktis dengan melupakan garapan sosial, keagamaan, dan ekonomi ini telah memompakan semangat agar NU berposisi sebagai Gersosag (Gerakan Sosial Keagamaan) saja.¹³² Akan tetapi gagasan yang paling dominan adalah membawa NU kembali menjadi organisasi

¹³¹ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian*, 133.

¹³² Ahmad Nurhasyim dan Nur Khalik Ridwan, *Demoralisasi Khittah NU Dan Pembaruan* (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2004) 30-31.

yang bukan hanya eksis (wujud, ada), tetapi juga mempunyai peranan nyata ditengah perjalanan bangsa Indonesia.¹³³

Majelis 24, secara konsepsional merumuskan Khittah 1926. Pertama kali yang mereka lakukan ialah meyakinkan tokoh-tokoh NU bahwa kembali ke Khittah 1926 merupakan suatu keharusan. Cara yang dilakukan untuk meyakinkan tokoh-tokoh NU tersebut adalah melewati silaturahmi ke para kiai dan menerbitkan Jurnal Khittah.¹³⁴ Pada tahun 1983 Abdurrahman Wahid terus berkeliling negeri dengan mengunjungi pesantren-pesantren di seluruh Jawa selaku menjadi anggota Dewan Syuriah NU. Selain itu, Abdurrahman Wahid juga mengunjungi basis-basis kekuatan NU di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan dengan alasan selain ia adalah anggota Dewan Syuriah. Abdurrahman Wahid juga menjelaskan perlunya mengadakan pembaharuan dan mendesak mereka untuk mengakui adanya keperluan itu. Hal itu dilakukan karena Abdurrahman Wahid sadar akan adanya banyak kebingungan dan kekhawatiran mengenai pertentangan terbuka dalam kepemimpinan nasional NU jika terjadi kesalah fahaman mengenai arti kembali ke Khittah 1926.¹³⁵

Bersamaan dengan itu, Abdurrahman Wahid yang tergabung dalam Majelis 24 serta kiai Achmad Siddiq mulai memformulasikan tanggapan atas isu Pancasila

¹³³ Tim Tujuh, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926* (Jakarta: LAKPESDAM NU, 1994), 1.

¹³⁴ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, (Jakarta: Erlangga, 1992), 143.

¹³⁵ Greg Barton, 159.

yang didengungkan pemerintah.¹³⁶ Majelis 24 membentuk sebuah tim, yang kemudian disepakati bernama “TIM TUJUH UNTUK PEMULIHAN KHITTAH NU 1926”. Tim ditugaskan untuk merumuskan konsep pembenahan dan pengembangan NU yang sesuai dengan Khittah NU 1926 serta menyusun rumusan pola kepemimpinan NU yang sesuai dengan perkembangan serta garapan yang hendak diterjuni.¹³⁷ Anggota dari Tim Tujuh tersebut adalah KH. Abdurrahman Wahid, M. Zamroni, H. M. Said Budairi, H. Mahbub Junaidi, H. Fahmi D. Saifuddin, H. M. Danial Tanjung, dan A. Bagja, kesemuanya adalah tokoh muda yang berbasis di Jakarta. Namun KH. Mustofa Bisri, salah seorang kiai muda yang sebenarnya bukan anggota dari Tim tersebut memberikan sumbangan terhadap gagasan-gagasan yang dirumuskan dan kemudian diimplementasikan oleh Tim Tujuh.¹³⁸

Tim Tujuh diketuai Abdurrahman Wahid dengan salah seorang aktivis utamanya Fahmi Saifuddin diberikan waktu selama 5 bulan untuk menuntaskan amanah yang diberikan oleh "Majelis 24". Tim akan mengakhiri masa tugasnya jika apa yang telah ditugaskan oleh Majelis 24 (mengenai konsep pembenahan dan pengembangan NU yang sesuai dengan Khittah NU 1926 serta menyusun rumusan

¹³⁶ Menjelang tahun 1983, Soeharto telah semakin jelas ingin mendesak diterimanya Pancasila secara luas sebagai asas tunggal bagi semua organisasi yang pertama kali ia sampaikan pada awal tahun 1983 di Riau, setelah berlangsungnya sidang lima tahunan MPR yang memilihnya kembali sebagai presiden. Gus dur mendapat informasi intelijen dari jendral Benni Murdani bahwa organisasi-organisasi yang menolak mengakui Pancasila sebagai asas tunggal pada akhirnya akan menghadapi desakan desakan yang tak akan dapat ditahan lagi dari pemerintah untuk menyerah.

¹³⁷ Tim Tujuh, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926*, 2.

¹³⁸ Greg Fealy dkk, 231.

pola kepemimpinan NU yang sesuai dengan perkembangan NU serta garapan yang hendak diterjuni) telah diselesaikan¹³⁹.

Tim Tujuh sebenarnya tidak berpretensi akan dapat memecahkan konflik mendasar yang sedang terjadi dan memikirkan sendiri rencana atau tugas besar Tim Tujuh¹⁴⁰. Seperti yang dijelaskan dalam SIARAN Nomor: 09/KEL/VII/83, Tim Tujuh hanyalah berfungsi sebagai katalisator yang berusaha melakukan komunikasi kesegala arah dan kepada semua pihak, guna membuat mereka melakukan komunikasi secara langsung antara sesama mereka. Dengan demikian, mereka mampu mencari penyelesaian terhadap konflik (juga menyelesaikan tugas besar yang diembannya) dan pikiran-pikiran mereka (eksponen Nahdlatul Ulama) kemudian ditampung dalam suatu wadah berupa Tim Tujuh. Tim Tujuh juga menghimbau para anggota DPR/MPR warga NU untuk juga memecahkan hambatan komunikasi intern antara mereka sendiri karena pemulihan komunikasi yang sehat dan terbuka antara mereka merupakan persyaratan bagi pemecahan konflik dalam tubuh NU.¹⁴²

Hal tersebut yang dijelaskan dalam paragraf di atas adalah langkah sebelum Tim Tujuh mengundang sejumlah eksponen warga NU, perorangan-perorangan yang dianggap dapat dimintai sumbangan pikirannya bagi

¹³⁹ Tim Tujuh, 2.

¹⁴⁰ Rencana atau tugas yang diamanahkan Majelis 24 kepada Tim Tujuh adalah mengenai konsep pembenahan dan pengembangan NU yang sesuai dengan Khittah NU 1926 serta menyusun rumusan pola kepemimpinan NU yang sesuai dengan perkembangan NU serta garapan yang hendak diterjuni.

¹⁴² SIARAN Nomor: 09/KEL/VII/83

penyelesaian kemelut yang terjadi dalam tubuh NU, langkah ini akan dimulai pada awal Agustus 1983. Tim ini bekerja dengan mengembangkan komunikasi seluas-luasnya melalui tulisan-tulisan untuk memperoleh masukan dari para pembaca. Eksponen NU yang memperoleh tulisan-tulisan maupun surat dari Tim berupa catatan dari pertemuan-pertemuan "Majelis 24" serta "Jurnal Khittah" kemudian memberikan tanggapan dari tulisan-tulisan tersebut. Selain dengan tulisan-tulisan, mereka juga mengadakan berbagai pertemuan dengan hampir semua tokoh teras NU baik pengurus maupun bukan, berdiskusi dengan berbagai lapisan warga NU serta berbagai kegiatan secara teratur telah disampaikan kepada anggota Majelis 24 maupun sebagai eksponen NU di hampir semua daerah di seluruh Indonesia. Bahkan juga dikomunikasikan kepada warga NU yang berada di luar negeri. untuk mendapatkan masukan-masukan terkait rencana mereka kedepan.¹⁴³

Eksponen-eksponen NU yang memperoleh bahan-bahan dari Tim berupa catatan pertemuan Majelis 24 serta Jurnal Khittah atau surat-surat yang dibuat Tim ternyata telah memberikan tanggapan yang amat menggembirakan. Mereka tidak hanya menyambut adanya Tim, tetapi bahkan banyak diantaranya yang memberikan sumbangan yang amat berharga bagi pekerjaan yang dilakukan oleh Tim. Hal itu selain meringankan kerja Tim, juga memperkaya sisi pandang, dimensi dan persepsi Tim dalam merumuskan konsep pembenahan dan pembinaan yang diinginkan. Ini berarti konsep NU yang dirancang Tim Tujuh merupakan

¹⁴³ Gunoto Saparie, *Harian Suara Merdeka*, 24 November 2004

hasil kolektif Tim dengan eksponen serta merupakan kesimpulan yang muncul dari sumbangan saran yang begitu banyak dari warga NU sendiri. Dengan demikian Tim hanya menyusun dan merumuskan apa yang menjadi keinginan dan kemauan warga NU yang telah memberikannya kepada Tim.¹⁴⁴

Pada sebuah memorandum yang dibuat di Jakarta tanggal 7 Agustus 1983 dan telah ditandatangani oleh ketua Tim Tujuh meminta Majelis 24 untuk memberikan tanggapan pada draf yang telah disusun. Draft adalah hasil dari keseluruhan saran yang diperoleh dari serangkaian wawancara, pertemuan kelompok, diskusi, penelaahan terhadap bahan-bahan tertulis seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Semuanya kemudian di klarifikasikan, dianalisis lalu dirangkum menjadi bahan tertulis yang dilampirkan bersama memorandum ini. Rangkuman ini merupakan draf pertama yang perlu disempurnakan lagi. Pertemuan Tim Tujuh pada tanggal 26 Juli 1983 memutuskan bahwa penyelenggaraan pertemuan Majelis 24 (yang seharusnya diselenggarakan pada bulan Syawal tahun 1983) ditanggihkan dan sebagai gantinya majelis 24 diminta memberikan tanggapannya terhadap draf pertama ini. Tim Tujuh memberikan lembar tanggapan terhadap pokok-pokok pikiran tentang pembenahan dan pengembangan NU berupa lembaran kusioner yang akan penulis lampirkan pada akhir tulisan. Kemudian tanggapan tertulis yang masuk ke Tim Tujuh akan

¹⁴⁴ Tim Tujuh, 5.

menjadi bahan penyusunan draf kedua yang kemudian akan dibahas bersama dalam pertemuan Majelis 24 yang akan datang.¹⁴⁵

Menurut Martin Van Bruinessen, rekomendasi-rekomendasi dari “Tim Tujuh” lebih jelas dibandingkan dengan KH. Achmad Siddiq dalam melihat masa depan NU. Tim tersebut memasukkan beberapa pikiran dari KH. Achmad Siddiq, namun kemudian dipadukan dengan pikiran-pikiran mereka. Mereka lebih menekankan kebutuhan akan berbagai aktifitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, termasuk saran-saran yang lebih praktis untuk penataan kembali NU.¹⁴⁶

Secara eksplisit, Tim Tujuh mengemukakan perlunya redefinisi wacana keagamaan tradisional, yang meluas sampai kepada masalah makna konsep ibadah. Tidak hanya aktifitas-aktifitas ritual seperti shalat yang dikatakan ibadah, tetapi kerja-kerja sosial dan karitatif juga merupakan bentuk ibadah. Rumusan ini memberikan pandangan keagamaan yang mendukung berbagai kegiatan pengembangan masyarakat. Selain itu Tim ini juga berbicara mengenai dinamisasi pemahaman NU terhadap hukum Islam, sehingga membuat wacana fiqh lebih responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan zaman modern.¹⁴⁷

Selain masalah sosial ekonomi dan keagamaan umat, Tim Tujuh dalam pembahasannya juga menekankan untuk menuntaskan masa transisi dari partai politik ke *jam'iyah diniyah* yang menurut KH. Achmad Siddiq masa transisi

¹⁴⁵ Tim Tujuh, Memorandum No : 11/KL/T-7/VIII/83, Jakarta, 7 Agustus 1983.

¹⁴⁶ Martin Van Bruinessen, 134.

¹⁴⁷ Ibid., 134.

tersebut pada dasarnya sudah berlangsung sejak tahun 1973. Tim Tujuh selanjutnya menghendaki kepemimpinan tertinggi harus dipegang oleh Dewan Syariah, dan bukan oleh para politisi dari Tanzfidziyah yang berkedudukan di Jakarta, sebagaimana berlangsung selama tiga dekade sebelumnya. Kelompok yang berorientasi kepada perubahan memiliki lobi yang terorganisasi dengan baik (yang tak diragukan lagi didukung oleh kenyataan, ide-idenya satu pandangan dengan pemerintah¹⁴⁸). Rekomendasi-rekomendasi Tim Tujuh diajukan kepada peserta yang sebagian besar menerimanya dalam munas alim ulama yang dilaksanakan pada Desember 1983 dan kemudian di sahkan dalam muktamar setahun berikutnya di Situbondo.¹⁴⁹

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa muktamar ini berhasil menunjuk kepemimpinan KH. Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid yang masing-masing mengetuai Dewan Syariah dan Tanfidziah. Tak kurang dari 11 anggota Majelis 24 juga masuk kedalam jajaran kepengurusan baru tersebut yang pada sebelum munas dan muktamar Situbondo peran dan pengaruh mereka sangat terlihat. Martin Van Bruinessen menyebutnya sebagai kemenangan nyata

¹⁴⁸Bagi pemerintah, kesediaanya berdekatan dengan NU tidak lepas dari pemikiran bahwa langkah NU sesuai dengan kehendak pemerintah. Kesesuaian tersebut adalah pertama, pemerintah ingin mengadakan pemisahan yang secara tegas antara organisasi politik dengan organisasi kemasyarakatan. Organisasi politik hendak dipisahkan dengan ikatan-ikatan kultural tertentu, agar menjadi organisasi yang terbuka. Hal ini sesuai dengan tujuan para tokoh muda NU yang ingin mengembalikan NU menjadi *jamiyyah diniyah* dengan keluar dari politik praktis. Kedua, pemerintah ingin menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya Asas. Hal ini sesuai dengan tujuan tokoh muda NU untuk menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi agar kecurigaan pemerintah terhadap NU hilang. Akan tetapi tujuan penerimaan Pancasila tidak hanya sebatas itu saja, bukan karena situasi tapi penerimaan itu benar-benar difikirkan dalam dari sudut pertimbangan keagamaan dan pemahaman NU terhadap sejarah.

¹⁴⁹ Greg Fealy dkk, 232-233.

bagi kiai Achmad Siddiq dan Tim Tujuh. ia juga menambahkan bahwa biasanya munas hanya berbicara mengenai masalah-masalah yang bersifat keagamaan semata, tetapi dalam munas kali ini sidang-sidang penting seluruhnya membicarakan khittah, dengan draf Tim Tujuh dan sebuah teks baru kiai Acmad sebagai masukan diskusi dalam munas. Kemudian di dalam munas tersebut berhasil disepakati untuk kembali ke Khittah 1926 dan menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Keputusan munas yang bersejarah tersebut kemudian disahkan dalam muktamar NU yang ke 27 tahun 1984 di pondok pesantren Asembagus Situbondo.¹⁵⁰

Hal yang tak kalah penting yang diraih dalam munas ini adalah berhasil dideklarasikan hubungan Pancasila dan Islam serta rekomendasi larangan perangkapan jabatan pengurus NU dengan jabatan pengurus organisasi politik. Tujuan dari pelarangan tersebut adalah bahwa NU benar-benar ingin meninggalkan politik praktis karena selama ini perangkapan jabatan sudah menjadi hal yang biasa di NU. Penegasan ini berkaitan juga dengan perubahan orientasi peran NU, dari makro ke mikro yakni dengan mengarahkan partisipasi masyarakat dari bawah seperti yang diungkapkan Abdurrahman Wahid dalam majalah Aula, Desember 1985.

Orientasi baru ini menurut Kacung Marijan menunjukkan begitu kuatnya gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid beserta kelompoknya didalam tubuh NU

¹⁵⁰ Martin Van Bruinessen, 132.

yang banyak dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh LSM. Hal ini bisa dipahami mengingat Abdurrahman Wahid beserta tokoh-tokoh muda NU lainnya adalah aktivis LSM.¹⁵¹ Abdurrahman Wahid juga menjadi ketua panitia pelaksana yang mempersiapkan munas Situbondo yang memberinya kesempatan lebih untuk menentukan apa yang akan dibicarakan disana.¹⁵² Hal tersebut pastilah sangat menentukan arah pengambilan keputusan dalam munas tersebut.

Pengambilan kesepakatan ini tidak terlepas dari perjuangan Achmad Siddiq, Abdurrahman Wahid, Majelis 24 serta Tim Tujuh dan dengan dukungan yang kuat dari para ulama senior NU lainnya. Kiai Achmad Siddiq yang fasih berbicara merupakan instrumen yang bisa menyakinkan para peserta munas untuk menerima secara formal keputusan-keputusan di atas. Posisi Abdurrahman Wahid sebagai ketua panitia pelaksanaan munas Situbondo juga menentukan hasil munas tersebut karena mendapat kesempatan lebih untuk mengatur apa yang akan dicicarakan disana. Selain itu Abdurrahman Wahid juga sangat aktif berkonsultasi dengan pejabat pemerintah seperti jendral Benny Moerdani untuk memformulasi kerangka kerja yang bisa disetujui dan saling menguntungkan dengan pemerintah. Abdurrahman Wahid juga berperan besar dalam pengarahannya diskusi dalam sidang-sidang munas untuk menerima resolusi yang dirumuskan oleh KH. Achmad Siddiq. Melalui Munas ini, kiprah duet Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid

¹⁵¹ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), 158.

¹⁵² Martin Van Bruinessen, 133.

diakui secara luas dan semakin memantapkan posisi kepemimpinan mereka dalam Mukhtamar NU tahun 1984.¹⁵³

Negoisasi-negoisasi dengan ulama-ulama peserta diskusi pada munas dalam agenda penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dan kembalinya ke khittah tidaklah mudah begitu saja karena banyak pandangan-pandangan yang berbeda-beda dari ulama. Seperti KH. Tolkhah Mansur dari Yogyakarta yang mempunyai pandangan sendiri dengan apa yang disampaikan pada diskusi ini. Seketika itu Abdurrahman Wahid segera menyarankan KH. Tolkhah untuk menggunakan bahasa Arab untuk menghindari kecurigaan dari para intelegent pemerintah. Dengan begitu Abdurrahman Wahid yakin bahwa para intelegent tersebut tidak akan mengerti apa yang dibicarakan dalam diskusi tersebut karena mereka pasti tidak menguasai bahasa Arab. Debat serius tetapi sopan tersebut diadakan dari pukul 20.00 malam hingga 04.00 pagi. Akhirnya KH. Tholkhah menerima Pancasila dari pendapat Abdurrahman Wahid dalam diskusi.¹⁵⁴

Abdurrahman Wahid dalam debat tersebut menyatakan bahwa Pancasila merefleksikan prinsip-prinsip dasar Islam sehingga tidak perlu lagi adanya suatu negara Islam. Abdurrahman Wahid telah lama percaya bahwa Pancasila merupakan kompromi terbaik untuk memecahkan masalah-masalah sulit mengenai hubungan bangsa dan negara.¹⁵⁵ Kiai Tolkhah juga menganggap bahwa Islam

¹⁵³ Greg Fealy dkk, 132.

¹⁵⁴ Greeg Barton, 159.

¹⁵⁵ Sepanjang tahun 1970-an dan pada awal 1980-an Gus Dur menyatakan idenya dalam serangkaian tulisan pendek dan panjang dengan mengajukan argumentasi bahwa sebuah konstitusi

lebih lengkap dari Pancasila yang tentu saja Islam mencakup keduanya dan kemudian mau menerimanya. Diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal tersebut membuat para kiai merasa lega karena mereka tidak lagi berseteru dengan pemerintah.¹⁵⁶

Seperti yang telah diungkapkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa keputusan yang diambil dalam munas tersebut belum terlalu kuat. Hal ini dikarenakan secara organisatoris masih ada forum lain yang memiliki otoritas pembuatan keputusan yang lebih tinggi, yaitu muktamar. Oleh karena itu keputusan dalam munas tersebut lantas dibawa ke dalam muktamar NU setahun berikutnya di tempat yang sama, 8-12 Desember 1984. Muktamar inilah yang menjadi titik balik dari kegiatan organisasi NU selama ini. NU meninggalkan politik praktis dan kemudian aktif pada kegiatan sosial keagamaan yang sebelumnya relatif terbengkalai. Pada muktamar ini pula hubungan NU dengan pemerintah yang sebelumnya renggang kemudian kembali dekat. Hal ini ditandai dari bersedianya presiden Soeharto membuka muktamar dan hadirnya sejumlah menteri untuk memberikan sambutan.

yang secara formal menetapkan peran bagi Islam dalam negara akan membawa akibat tidak menyenangkan, bukan saja bagi kaum nonmuslim dan kaum muslim abangan, melainkan juga bagi kaum muslim santri yang tidak setuju dengan garis resmi keagamaan yang dibuat oleh negara. Ia juga berpendapat bahwa jika negara dilibatkan untuk menjadi juri bagi masalah-masalah agama, hasilnya akan selalu berupa penginjak-injakan kemerdekaan beragama warga negara oleh negara. Oleh karena itu Gus Dur menganggap lebih baik bagi negara untuk menjaga jarak dari masalah-masalah agama dan membiarkan organisasi-organisasi agama mengurus masalah mereka sendiri. Menurutnya negara dengan Pancasilanya tidaklah bersifat sektarian maupun sekular, dan oleh karena itu Pancasila merupakan kompromi yang terbaik bagi bangsa. Greeg Barton, 160.

¹⁵⁶ Greeg Barton, 160.

Perjalan menuju muktamar tersebut pastilah tidak mulus dan banyak pertentangan dan konflik disana. Abdurrahman Wahid sebagai tokoh pembaharu muda NU beserta teman-teman dan ulama yang tergabung dalam Majelis 24 serta Tim Tujuh sedikit banyak masuk dalam konflik-konflik tersebut. Mereka mencoba menjadi penengah dalam konflik menuju muktamar yang bisa dibilang paling bersejarah dalam tubuh NU ini. Oleh karena itu peran dan posisi Abdurrahman Wahid dalam konflik-konflik menuju muktamar akan penulis jelaskan pada subab berikutnya.

B. Peran dan Posisi Abdurrahman Wahid Dalam Konflik Menuju Muktamar Situbondo

Pada tanggal 2 Mei 1982 sejumlah pengurus teras NU bertemu dengan ketua umum PBNU Idham Chalid dan memintanya agar mengundurkan diri dari jabatannya. Pada awalnya Idham Chalid yang telah memimpin NU sejak era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menolak permintaan itu. Tetapi akhirnya Idham Chalid mundur karena besarnya tekanan yang diterima. Mendengar pengunduran diri itu, Abdurrahman Wahid pada tanggal 6 Mei 1982 datang menemui Idham Chalid dan menyatakan bahwa permintaan mundur itu tidak konstitusional. Idham Chalid akhirnya membatalkan pengunduran dirinya, hal tersebut kemudian menimbulkan konflik dalam tubuh NU. Abdurrahman Wahid sendiri beserta kyai muda lainnya kemudian bertindak sebagai negosiator

yang mencari kesepahaman antara Idham Chalid dan pengurus PBNU lain yang memintanya mundur.¹⁵⁷

Pasca pemilu 1982, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden RI untuk masa jabatan yang ke-4. Ia mulai mengambil langkah-langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Abdurrahman Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap langkah Soeharto tersebut. Setelah berkonsultasi dengan banyak orang dan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai referensi pembenaran, pada Oktober 1983 Abdurrahman Wahid menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Pada saat yang sama, Abdurrahman Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan aktifitas politik lainnya dengan alasan agar bisa lebih intensif dalam menghidupkan NU.¹⁵⁸ Tentu saja hal ini tidak dilakukan sendirian dan Abdurrahman Wahid dibantu oleh tokoh-tokoh muda dan ulama ulama senior NU lainnya yang peduli dengan masa depan NU.

Munas alim ulama NU di Situbondo tahun 1983 berhasil menerima Pancasila sebagai asas NU yang berarti NU telah menuntaskan pola hubungan antar agama dan negara. Dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI adalah bentuk final. Sesungguhnya sikap semacam itu telah dinyatakan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan turut sertanya wakil NU (Wahid Hasyim) dalam menandatangani dan merumuskan pembukaan UUD 1945. Selain menerima

¹⁵⁷ Ali Masykur Musa, *Pemikiran Dan Sikap Politik Gus Dur* (Jakarta: Erlangga, 2010), 11.

¹⁵⁸ *Ibid.*, 11.

asas Pancasila munas ini juga menetapkan NU kembali ke Khittah 1926. Khusus masalah khittah, munas merekomendasikannya dalam muktamar NU tahun berikutnya. Untuk keperluan tersebut, munas berhasil menyepakati Abdurrahman Wahid sebagai ketua panitia muktamar Situbondo.¹⁵⁹ Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sebelum muktamar ini dilaksanakan telah terjadi konflik dalam tubuh NU antara kubu Cipete dan Situbondo.

Diawali dari kiai As'ad Syamsul Arifin yang menemui presiden Soeharto untuk meminta penjelasan mengenai asas tunggal Pancasila. Hal tersebut dilakukan karena masalah tersebut telah masuk keranah keimanan, para ulama senior NU merasa perlu mendapat penjelasan langsung dari Presiden Soeharto, terutama mengenai pengertian dari sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa). Saat itu Abdurrahman Wahid dikenal sebagai pemikir dan pembaharu Islam moderat dan dekat dengan sejumlah perwira tinggi ABRI, tidaklah merasa sulit untuk mengatur pertemuan para ulama dengan presiden Soeharto.

Terlebih kedekatannya dengan Jenderal L. Benny Moerdani (baik ketika Benny masih Asisten Dephankam merangkap Asisten Kopkamtib dan Waka Bakin maupun setelah ia diangkat menjadi Panglima ABRI pada 23 Maret 1983), dapat dimanfaatkan sebagai pintu pembuka pertemuan ulama senior NU dengan Presiden Soeharto. Selain itu, posisi Abdurrahman Wahid sendiri pada saat itu bertindak sebagai Manggala (penatar tingkat tinggi) BP7 (baik dalam artian Badan

¹⁵⁹ Choirul Anam, *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa Suka Duka Mengikuti Gus Dur Sejak 1978* (Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 2010), 21.

Panitia Penasehat Presiden tentang P4 maupun BP7 dalam pengertian Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4), cukup bisa dipahami pemerintah jika harus mengatur pertemuan para ulama dengan Presiden Soeharto.

Pada awal Agustus 1983, KH. As'ad Syamsul Arifin (Situbondo) diterima presiden Soeharto di Istana Negara. Setelah mendapat penjelasan dari Kepala Negara, Kiai As'ad menyimpulkan bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang dipahami Presiden Soeharto adalah sama dengan yang dipahami umat Islam Indonesia selama ini, yakni ketauhidan. Mendengar kabar Kiai As'ad diterima oleh presiden Soeharto dan berencana menggelar Munas alim Ulama serta merencanakan muktamar. Kubu politisi (Cipete) tidak ingin kalah yang kemudian menggelar rapat pleno PBNU (7-8 Desember 1983) dan memutuskan Menerima Pancasila sebagai asas Jamiyyah NU. Selain itu juga merencanakan menggelar muktamar NU ke-27 (direncanakan April 1984) dengan menunjuk Drs. H.A. Cholid Mawardi sebagai ketua panitia.

Akan tetapi para ulama kubu Situbondo tetap arif dan tidak melayani gempuran kubu Cipete. Munas Ulama yang dijadwalkan 18-21 Desember 1983 (meski sudah didahului kubu Cipete), tetap berlangsung sesuai rencana. KH. Achmad Siddiq dan Tim perumus khittah yang dikomandani Abdurrahman Wahid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berpikir keras dan bekerja lembur dalam tataran konsep. Di depan para ulama peserta Munas, Kiai Achmad Siddiq dengan sangat piawai memaparkan pandangannya (dengan kajian mendalam dari segi

historis maupun sudut pandang agama) mengenai asas Pancasila. Sehingga, para ulama yang semula ragu berubah menjadi sepakat bulat menerima Pancasila sebagai asas organisasi NU. Begitu pula dalam hal khittah, Kiai Achmad menguraikannya sangat meyakinkan sampai kemudian peserta Munas sepakat, NU harus kembali ke Khittah 1926. NU menetapkan kembali pilihan bidang garapannya sebagaimana saat didirikan. Secara organisatoris, NU tidak boleh lagi terkait dengan Orsospol manapun juga. Sedangkan warga NU sebagai warga negara bebas masuk atau tidak masuk Orsospol yang manapun.

Sejak Munas Ulama NU Situbondo (Desember 1983), NU sudah lepas dari keterikatan dengan Orsospol manapun. Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi, dalam pandangan NU adalah menuntaskan pola hubungan antara agama dan negara. Dengan kata lain, di mata NU sudah tidak ada lagi kata alternatif dasar maupun bentuk negara. Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI adalah final. Proses penerimaan kubu Situbondo lebih konseptual dari pada kubu Cipete karena lebih dulu melakukan kajian yang mendalam mengenai hubungan agama dan negara serta maksud dan tujuan pemerintah, baik dari segi historis, sosiologis, budaya maupun hukum Islam. Karena itu pemerintah nampak berada dibelakang kubu Situbondo.¹⁶⁰ Meski begitu pemerintah juga berharap agar

¹⁶⁰ Telah disebutkan sebelumnya bahwa ada dua ketua muktamar, yaitu Abdurrahman Wahid yang ditunjuk dalam munas Situbondo serta Chalid Mawardi yang ditunjuk oleh kubu Cipete. Akan tetapi Pemerintah memainkan peranannya dengan memperlihatkan sikapnya yang lebih mendukung Situbondo sebagai tempat penyelenggaraan muktamar serta Abdurrahman Wahid sebagai ketua muktamar bahkan untuk menjadi ketua NU kedepan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk Chalid Mawardi (yang pada saat itu juga menjadi calon kuat ketua umum) sebagai duta

Idham Chalid diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya sesuai prosedur organisasi, walau akhirnya harus mundur. Selain itu, pemerintah kemudian juga ikut mendorong terciptanya kerukunan antara kedua kubu yang saling bertikai.¹⁶¹ Empat bulan setelah maklumat keakaraban diproklamirkan kemudian dilaksanakanlah muktamar Situbondo tanggal 8-13 Desember 1984 di Situbondo.

Abdurrahman Wahid mendapatkan amanat sebagai ketua muktamar dan langkah pertama Abdurrahman Wahid selaku ketua panitia adalah melakukan penyederhanaan jumlah cabang. Panitia kemudian memutuskan mengadakan penyusutan dengan prinsip setiap daerah tingkat II hanya diberikan kuota satu cabang. Namun menurut Said Budairi selaku sekretaris panitia, semua cabang yang jumlahnya 370 diundang. Tapi cabang yang berhak bersuara akan ditentukan panitia. Semua pihak yang pernah terlibat konflik terutama KH Idham Chalid dan para pendukungnya diundang dan kemudian hadir.¹⁶²

besar untuk Syiria beberapa bulan sebelum muktamar tersebut dilaksanakan. Hal ini membuat Abdurrahman Wahid hampir dapat dipastikan terpilih. Setelah kedua kubu bertemu pemerintah (Presiden, Mendagri, dan Menteri Agama) kedua kubu tersebut kemudian melunak. Abdurrahman Wahid beserta Tim Tujuh dan dibantu nyi Wahid Hasyim (Solichah) dengan menggunakan wibawanya yang besar berhasil membujuk keduanya untuk mau bekerjasama.¹⁶⁰ Akhirnya terjadi sebuah rekonsiliasi perdamaian antara kedua kubu. Melalui sebuah acara tahlilah di kediaman KH. Hasyim Latief, ketua PWNU Jawa Timur, Sepanjang Sidoarjo 10 September 1984, lahirlah “maklumat keakaraban”. Isi maklumat tersebut pada intinya adalah mengakhiri konflik, saling memaafkan dan bersepakat untuk mensukseskan muktamar NU ke 27 di Situbondo Jawa Timur. Maklumat bersejarah itu ditandatangani oleh tujuh ulama terkemuka antara lain KH. R. As’ad Syamsul Arifin, KH. Ali Ma’shum, KH. Idham Chalid, KH. Macrus Aly, KH. Masjkur, KH. Saifuddin Zuhri dan KH. Achmad Siddiq. Laode Ida, *Dinamika Internal Nahdlatul Ulama*, 142.¹⁶⁰

¹⁶¹ Ibid., 22.

¹⁶² Ibid., 28.

Sebagai ketua muktamar, Abdurrahman Wahid menyampaikan secara tegas dan terbuka tiga fokus utama yang menjadi hal prinsip untuk diperhatikan oleh muktamirin melalui sambutannya yang menyatakan:

1. Setelah sekian lama berkiprah dalam aktifitas politik praktis kini NU kembali keorientasi semula yakni lebih memperhatikan berbagai persoalan masyarakat secara lebih luas. Menyelenggarakan berbagai kegiatan multisektoral untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, dan mengholangkan keterbelakangan yang masih menjadi ciri utama mayoritas bangsa dalam beberapa bidang kehidupan.
2. NU akan melaksanakan pergantian kepemimpinan dari generasi tua ke generasi muda, yang dilangsungkan dengan tetap memelihara keselarasan serta keserasian hubungan antar generasi.
3. NU akan menuntaskan secara lebih jelas dan tuntas, hubungan yang kompleks antara Islam dan negara Pancasila, guna memungkinkan tegaknya bangsa Indonesia secara terhormat dalam pergaulan antar bangsa di dunia.¹⁶³

Laode Ida menyebut isi sambutan itu terlihat sebagai gambaran dari kebesaran jiwa bahkan keyakinan bahwa gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh Tim Tujuh akan berhasil. Abdurrahman Wahid dan anggota-anggota kelompok muda NU khususnya yang tergabung dalam Majelis 24 dan Tim Tujuh, umumnya merupakan generasi ketiga NU yang latar pendidikan mereka sangat plural.

¹⁶³ Laode Ida, *Dinamika Internal Nahdlatul Ulama*, 142.

Mereka tidak hanya bersentuhan dengan nilai-nilai pesantren, melainkan juga nilai-nilai yang bersifat kosmopolit.¹⁶⁴

Mengenai pergantian kepemimpinan, telah dilakukan negosiasi-negosiasi antara berbagai fraksi dan penguasa perihal komposisi pengurus yang akan dipilih dalam muktamar dilakukan selama 1984. Abdurrahman Wahid memainkan peranan kunci dalam berbagai negosiasi ini. Idham Chalid yang masih memegang kesetiaan cabang NU, terutama di luar Jawa, setuju tidak lagi mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum dengan syarat sejumlah sekutunya (seperti Anwar Musaddad, Ali Yafie, dan Chalid Mawardi) diberi posisi penting dalam kepengurusan baru.¹⁶⁵

Sebuah kesepakatan mengenai konsep pemilihan dan penyusunan pengurus sudah disepakati sebelum muktamar ini dimulai. Pembahasan mengenai hal tersebut dilaksanakan pada Jum'at malam, 7 Desember 1984 (sehari sebelum muktamar dibuka) yang dipimpin KH. Masykur. Pembahasan yang dilakukan oleh 35 kiai senior dan rais syuriah PWNU seluruh Indonesia ini berhasil menyepakati konsep pemilihan pengurus baru. Konsep pemilihan dari kiai Achmad Siddiq tersebut antara lain dengan *ahlul halli wal aqdi*, memilih seorang ulama yang berkompeten, yang kemudian menunjuk enam ulama *ahlul halli wal aqdi*. Selasa malam tanggal 11 Desember 1984, dilakukan pemilihan seorang ulama yang berkompeten sebagai *ahlul halli wal aqdi*, yang kemudian Kiai As'ad terpilih

¹⁶⁴ Ibid., 143.

¹⁶⁵ Martin Van Bruinessen, 138.

sebagai *ahlul halli wal aqdi*. Sebelum pemilihan KH Idham Chalid telah mengirim surat kepada muktamirin agar memilih kiai As'ad Syamsul Arifin. Hal ini menunjukkan pengaruh Idham Chalid masih sangat kuat di kalangan pengurus cabang maupun wilayah NU.¹⁶⁶

Cara pemilihan itu disetujui Abdurrahman Wahid selaku ketua panitia, selain itu ia setuju karena menganggap hal itu sebagai formalitas semata. Ia kemudian memberikan daftar anggota-anggota yang disukainya untuk duduk dalam pengurus PBNU. Daftar ini kemudian ditandatangani oleh Idham Chalid disebelah kiri, oleh Munawir Sjadzali di tengah, dan oleh Abdurrahman Wahid disebelah kanan. Pagi-pagi sekali pada hari terakhir muktamar, setelah para peserta muktamar secara formal mengambil keputusan munas mengenai Pancasila dan kembalinya NU ke Khittah 1926, Abdurrahman Wahid pergi ke Pasir Putih yang terletak sekitar 50 km dari kota Situbondo untuk menjumpai Idham Chalid di hotelnya. Ia tiba sebelum fajar agar dapat melakukan pertemuan terakhir dengan Idham dan menanyakan apakah akan ada perubahan yang ingin dibuatnya terhadap daftar itu. Kemudian Idham Chalid menuliskan sebuah nama baru untuk jabatan bendahara dan kemudian menandatangani surat itu lagi. Setelah kembali ke Situbondo, kemudian Abdurrahman Wahid menyerahkan daftar itu kepada kiai

¹⁶⁶ Choirul Anam, *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa Suka Duka Mengikuti Gus Dur Sejak 1978*, 30.

As'ad kemudian juga menandatangani daftar itu, daftar yang akan membimbing dewan pemilihan dalam merumuskan susunan kepemimpinan baru.¹⁶⁷

Kiai As'ad kemudian menunjuk enam pembantu dan mengajak mereka berdiskusi selama sekitar 25 menit di kantor pesantren. Keenam ulama yang ditunjuk adalah KH. Ali Ma'shum, KH. Machrus Ali, KH. Masykur, KH. Achmad Siddiq, KH. Saifuddin Zuhri dan KH. Munasir Ali. Tujuh orang tersebut kemudian berdiskusi menentukan gambaran calon pemimpin NU dimasa mendatang. Kiai As'ad kemudian mengumumkan hasil diskusi tersebut yang menunjuk ketua kiai Achmad Siddiq serta Abdurrahman Wahid masing-masing menjadi ketua Dewan Syariah dan Tanfidziah NU.¹⁶⁸

Pada Dewan Syariah, KH. Achmad Siddiq menjadi Rais A'am dengan kiai Radli Saleh sebagai wakilnya. Para rais lainnya adalah KH. Nadjib Abdul Wahab, KH. Yusuf Hasyim, KH. Tolchah Mansoer, KH. Ali Yafie, KH. Sahal Mahfudz. Sedangkan katib a'am (sekertaris umum syariah) dijabat KH. Hamid Widjaja. Sedangkan pada dewan tanfidziah Abdurrahman Wahid menjadi ketua umum dengan wakil ketua Mahbub Djunaidi, Fahmi Dja'far Saifuddin, Hasyim Latief, Saiful Mudjab, Syah Manaf, dan Romas Djajaseputra. Sekjen PBNU: Anwar Nuris dengan wakil Asnawi Latif dan Ahmad Bagja. Bendahara: Sjaicul Islam dan Said Budairi.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Greg Barton, 168.

¹⁶⁸ Chairul Anam, *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa*, 31

¹⁶⁹ *Ibid.*, 32.

Susunan ini sama sekali berbeda dari nama-nama yang ada di daftar yang ditanda tangani oleh Abdurrahman Wahid. Hampir semua orang Idham disingkirkan dan diganti dengan orang-orang yang dipilih oleh kiai As'ad. Disini dapat dilihat bahwa fraksi Idham Chalid jauh lebih sedikit dari yang disepakati sebelumnya. Menurut Martin Van Bruinessen, kiai As'ad yang pada waktu-waktu terakhir mencoret calon-calon yang diunggulkan Idham dari daftar dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih sukainya. Dapat dilihat dari fraksi Idham hanya Ali Yafie yang yang tetap menjabat di syuriah sebagai salah satu rais, Idham sendiri diberi posisi sebagai mustasyar (penasehat), satu posisi yang tak mempunyai pengaruh nyata. Hal ini tentu saja mengejutkan Abdurrahman Wahid, selain itu kelompok Idham lama mencurigai dirinya bekerja sama dengan kiai As'ad dalam melakukan perubahan pada saat-saat terakhir.¹⁷⁰

Sebagai akibatnya NU terus dilanda konflik faksi selama beberapa tahun berikutnya. Faksi Idham merasa tidak puas dan kelompok ini menarik kelompok-kelompok lain yang karena satu atau lain alasan tidak menyetujui keputusan Situbondo. Konfrontasi yang dihindari dengan menjadikan kompromi sebagai landasan berpolitik nampaknya gagal dilakukan karena perubahan-perubahan pada detik-detik terakhir pada daftar tersebut oleh kiai As'ad. Hal ini membuat usaha untuk mereformasi NU yang sudah sulit itu menjadi lebih sulit lagi.¹⁷¹

¹⁷⁰ Martin Van Bruinessen, 140.

¹⁷¹ Greg Barton, 169.

Meski terjadi sebuah hal yang kurang menyenangkan bagi kubu Idham dan kekecewaan Abdurrahman Wahid pada putusan kepemimpinan NU, naiknya pasangan Abdurrahman Wahid dan Achmad Siddiq menjadi pemimpin baru disambut hangat oleh banyak kalangan. Para pengkritik Idham Chalid merasa bahwa di bawah kepemimpinannya, kegiatan utama NU terabaikan sedangkan pada saat yang sama hampir tidak ada usaha yang dilakukan Idham untuk meredam erosi kepentingan politik NU di PPP.

Mereka menolak Idham karena mereka menganggap orang-orang ini adalah politikus kota yang hampir tidak menaruh minat pada kegiatan kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan NU. Diangkatnya kedua pemimpin baru ini memberikan harapan baru bahwa NU mungkin akan kembali bisa memainkan peran penting dalam kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu bagi kalangan yang mencari reformasi dan tanggapan yang kreatif terhadap tantangan modernitas dalam NU, muktamar NU tahun 1984 ini menandai mulanya suatu zaman baru.¹⁷²

C. Abdurrahman Wahid Pasca Muktamar Situbondo Sampai Pemilu Tahun 1987

Sebulan setelah muktamar Situbondo, tepatnya Januari 1985, PBNU baru pimpinan Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid menggelar rapat pleno pertama di pondok pesantren tebuireng jombang. Rapat pleno tersebut kemudian mengesahkan yang berhak dan boleh mewakili NU keluar (terutama menghadap

¹⁷² Ibid., 173-174.

pemerintah) adalah rais a'am KH. Achmad Siddiq dan Gus Dur. Akan tetapi keputusan itu kemudian memicu keretakan hubungan Gus Dur dengan kiai As'ad Syamsul Arifin. Sebab, semasa NU dilanda konflik, kiai As'ad merupakan tokoh yang seringkali berhubungan dengan pemerintah. Hal tersebut membuat kiai As'ad merasa dibatasi yang kemudian hubungan layaknya ayah dan anak tersebut semakin renggang.¹⁷³

Meski tujuan dari disahkannya rapat pleno tersebut sama sekali tidak bertujuan membatasi ruang gerak kiai As'ad, faktanya hubungan baik tersebut semakin renggang dan kiai As'ad semakin tidak respek terhadap pernyataan Gus Dur mengenai susunan pengurus PBNU hasil muktamar Situbondo. Gus Dur menilai susunan pengurus PBNU yang ditunjuk kiai as'ad bersama *ahlul halli wal aqdi* dinilai kurang diorientasikan pada kemampuan, tetapi disusun berdasarkan titipan. Gus Dur mengakui dalam pengurus baru terlalu banyak pihak-pihak yang heterogen. Padahal, Gus Dur berencana membentuk semacam badan otonom yang memegang kendali kegiatan, semisal untuk pendidikan diserahkan kepada LP Ma'arif, untuk pertanian akan dibuat badan khusus yang didukung para ahli yang kompeten dibidang itu. Periode pertama pemerintahan Gus Dur dalam tubuh NU bisa dibilang hanya terkuras untuk menjelaskan duduk perkara, menjelaskan sikap dan lontaran pikirannya.¹⁷⁴

¹⁷³ Chairul Anam, *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa*, 34

¹⁷⁴ *Ibid.*, 35-36.

Program kerja yang disusun pada muktamar ke 27 telah mencanangkan suatu program untuk meningkatkan kualitas warga nahdliyin tidak sedikit yang tidak bisa terealisasi. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa semuanya itu tidak lepas dari kurangnya tenaga profesional di lingkungan NU untuk merealisasikan program kerja. Ide-ide cemerlang dari Abdurrahman Wahid serta para intelektual NU lainnya acapkali kurang dapat diterjemahkan oleh bawahannya. Kurangnya tenaga profesional ini telah disadari sebelumnya oleh NU. Muktamar ke 27 telah mencanangkan suatu program untuk meningkatkan kualitas warga nahdliyin, yakni dengan apa yang disebut sebagai program “peningkatan kualitas hidup”. Untuk menunjang pelaksanaannya dan penggodokan konsepsi-konsepsi pada 7 april 1987 telah dibentuk organisasi bernama “Lajnah Kajian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia” atau Lakpesdam. Lembaga ini bergerak seperti LSM, karena itu program-programnya mencakup pengebangan masyarakat bawah. Program demikian ditempuh karena menyadari salah satu kelemahan yang ada di warga nahdliyin, yakni rendahnya produktivitas dan pemanfaatan sumberdaya manusia. Abdurrahman Wahid dan kelompok intelektual lainnya telah lama menyadari perkembanga mengenai pentingnya persoalan sosioekonomi dalam masyarakat nahdliyin. Sebuah langkah berani untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup warga nahdliyin ditingkat bawah, telah dilakukan NU meski masih dalam langkah “kontroversi”. NU

mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang bekerjasama dengan Bank Suma.¹⁷⁵

Sebuah langkah yang bagus diambil oleh Gus Dur beserta jajaran pemuda NU lainnya dalam konteks memajukan NU meskipun pada saat itu kemelut masih terus terjadi di kubu NU. Ketika dalam muktamar NU di Situbondo menetapkan keputusan untuk kembali menjadi jam'iyah sesuai dengan Khittah 1926, yang sekaligus mengakhiri ikatan organisatoris dengan PPP. Keputusan tersebut menimbulkan sikap dan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa keluarnya NU dari politik praktis sangatlah tepat, baik materi maupun waktunya. Karena dengan demikian organisasi keagamaan ini diharapkan bisa kembali serius menanggapi masalah-masalah pendidikan, dakwah Islam, kegiatan sosial serta usaha kemasyarakatan yang lebih luas. Ada juga kalangan yang skeptis dan sinis merasa bahwa keputusan itu tidak lebih hanya dipengaruhi oleh rasa tidak senang terhadap kepemimpinan Naro di PPP, terutama dalam penyusunan daftar calon anggota DPR dalam pemilu 1982.¹⁷⁶

Pengambilan keputusan tersebut juga menimbulkan suatu polarisasi kekuatan antara elit NU yang dapat dikategorikan masuk dalam kelompok elit yang mendukung dan kelompok oposan sebagai penentang Khittah. Kelompok yang mendukung dianggap sebagai konsekuensi dari reorientasi dan regenerasi

¹⁷⁵ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*, 206.

¹⁷⁶ Bambang Santoso Haryono, "Persepsi Warga NU Terhadap Keputusan Politik Muktamar Situbondo 1984: Suatu Studi Di Kalangan Warga NU Kabupaten Daerah Tingkat II Malang – Jawa Timur", (Tesis, Universitas Gajah Mada, 1990), 110.

intern NU. Mereka ini adalah generasi kedua ulama NU antara lain: KH. Achmad Siddiq, KH. Ali Yafie, K. Radie Sholeh, K. Najib Ridwan, KH. Yusuf Hasyim, KH. Tholhah Mansur, dan KH. Sahah Mahfudz. Kelompok berikutnya adalah sekumpulan elit generasi ketiga NU, yang termasuk dalam kelompok ini adalah: H. Abdurrahman Wahid, Syaiful Mujab, Hasyim Latif, Syah Manaf, Mahbub Junaidi, Romas Djajasaputra, Fahmi Syaifuddin, Ahmad Bagja, Asnawi Manaf dan Said Budairy.¹⁷⁷

Disamping itu elit oposan atau yang menentang Khittah antara lain mereka yang sebagian besar adalah kiai politis atau da'i politisi. Kelompok ini menurut Bambang Santoso Haryono sulit diidentifikasi karena mereka menduduki jabatan tertentu (dalam PPP) dan tempatnya tersebar di berbagai daerah. Hanya karena persamaan aspirasi relatif dan sikap mereka saja yang menyebabkannya dapat dimasukkan dalam kelompok oposan ini. Mereka itu antara lain: KH. Idham Chalid, KH. Syamsuri Badawi, KH. Adlan Ali, H. Chalid Mawardi, H. Imam Sofyan, dan H. Muhammad Baidlowi.

Diambilnya keputusan untuk mengundurkan diri dari politik praktis serta pengakuan terhadap ideologi Pancasila dalam muktamar NU yang ke 27 tahun 1984 tidak semerta-merta menjadikan semua anggotanya tertib mengikuti hasil musyawarah tersebut. Diambilnya keputusan dalam musyawarah nasional di Situbondo yang kemudian disahkan dalam muktamar NU yang ke 27 tahun 1984

¹⁷⁷ Ibid., 111-112.

Situbondo, nampaknya masih kurang jelas bagi kaum nahdliyin karena mereka hanya dihibau untuk memanfaatkan hak-hak politik mereka secara jujur, serius dan bertanggung Jawab.¹⁷⁸ Selain itu dampak keterlibatan yang sangat mendalam dalam kegiatan politik praktis sebelumnya telah menyulitkan para elit NU untuk menerapkan peran politik baru secara efektif dan efisien yang merupakan implementasi dari keputusan kembali ke Khittah.

Untuk tujuan efektifitas dan efesiensi penerapan kembali ke Khittah, Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan peraturan No. 72/11/04/d/x1/85 yang kemudian juga dikukuhkan lagi dengan SK PBNU No. 72/A-II/04-d/XI/1985 mengenai perangkapan jabatan kepengurusan, peraturan ini mulai diterapkan tanggal 11 Januari 1985. Selain itu keputusan ini memberikan waktu satu tahun bagi para pengurus daerah untuk mentukan pilihan mereka antara karir politik atau sosial, dan dua tahun bagi para pengurus tingkat kabupaten. Isi dari peraturan tersebut adalah:

1. Pengurus harian Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi pengurus harian partai politik atau organisasi sosial politik manapun.
2. Batas waktu pelaksanaan tersebut pada angka 1 (satu) di atas adalah satu tahun untuk wilayah dan dua tahun untuk cabang.

¹⁷⁸ Andree Feillard, *NU Vis A Vis Negara Pencarian Isi Bentuk Dan Makna*, 263.

3. Kepada pengurus wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia supaya mengambil langkah-langkah kearah keputusan itu.¹⁷⁹

Langkah politik NU nampaknya membingungkan bagi peimpinan PPP Jaeludin Naro, sehingga pada tanggal 9 Januari 1985 di Pontianak, Naro menyatakan bahwa organisasi yang turut menandatangani deklarasi pembentukan PPP secara yuridis formal tetap mempunyai hubungan dengan PPP. Abdurrahman Wahid sesudah rapat gabungan pengurus harian PBNU di Jombang 11 Januari 1985 menyatakan, bahwa warga NU tidak otomatis menjadi anggota PPP sambil merujuk pernyataan Naro sendiri bahwa keanggotaan PPP adalah stelsel aktif.

Pemilu 1987 merupakan untuk pertama kalinya konsekuensi “kembali ke khittah 1926” diuji dan dimana konflik baru ditubuh NU mulai bermunculan. Pada pemilu sebelumnya para warga NU dihibau oleh kiainya untuk memberikan suaranya kepada PPP. Namun pada pemilu kali ini semuanya berbeda, Abdurrahman Wahid dan anggota PBNU lainnya berkunjung ke berbagai wilayah untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan khittah. Gus Dur dan para anggota PBNU lainnya berpesan kepada warga NU tidak diwajibkan lagi memilih PPP. Golput atau merusak kertas suara dinyatakan haram, tetapi setiap warga NU sejak saat itu bebas memilih diantara ketiga kontestan yang bertarung dalam pemilu 1987.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Moh Mahbud, “Kiprah Politik NU Pasca Khittah Studi Hubungan NU Dengan Negara Dalam Prespektif State And Civil Society”, (Tesis, Unair, 1999) 137-138.

¹⁸⁰ Sejak awal Juli 1986, kiai Achmad Siddiq sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa berpartisipasi dalam pemilu adalah wajib bagi semua warga NU (sebagai tindakan kesetiaan

Menjelang pemilu 1987, PBNU mengeluarkan 7 butir pedoman politik yang isinya, yakni:

1. Pengurus NU tidak boleh merangkap pengurus organisasi politik apapun diluar politik NU
2. Warga NU boleh dicalonkan dalam pemilu
3. Mereka yang dicalonkan boleh berkampanye untuk pihak yang mencalonkan
4. Warga NU yang bukan pengurus organisasi politik peserta pemilu dan bukan pula calon pemilu, tidak boleh berkampanye
5. Hal yang sama pula berlaku untuk mubalig atau da'i NU
6. Pengurus NU tidak diperkenankan menjadi komisaris organisasi politik dan menjadi wakil organisasi politik di dalam aparaturnya pemilu dan,
7. Segenap warga NU diminta berpartisipasi dalam pemilu 1987.¹⁸¹

Keputusan NU untuk kembali ke Khittah tentu saja telah menyulitkan PPP terutama menjelang pemilu 1987. Hal yang menarik menjelang pemilu 1987 ini adalah adanya pemikiran untuk mengurangi perolehan suara PPP, aksi ini dikenal sebagai aksi “penggembosan PPP”. Diantara tokoh-tokoh NU yang intens melakukan aksi penggembosan ini diantaranya adalah H Mahbub Djunaidi, KH. Yusuf Hasyim, Safi'i Sulaiman, KH. Sohib Bisri, H. Hasyim Latif, KH. Imron

kepada negara) tetapi menambahkan bahwa memberikan suara ke PPP tidak wajib, dan memilih Golkar dan PDI tidak haram. Martin Van Bruinessen, 141.

¹⁸¹ Moh Mahbud, “Kiprah Politik NU Pasca Khittah Studi Hubungan NU Dengan Negara Dalam Prespektif State And Civil Society”, 139.

Hamzah dan tokoh-tokoh lainnya. Aksi pengembosan PPP semakin mendapat tempat dikalangan NU ketika tokoh PPP memunculkan statemen yang menyinggung NU. Pernyataan-pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan Naro pada resepsi HUT PPP ke 14 di Bandung “biar saja telur busuk (NU) itu keluar dari PPP, terlalu lama dalam keranjang (PPP) yang baik malah akan merusak telur-telur yang lainnya yang masih bagus”.

Memasuki tahun 1986 warga NU terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merasa kecewa terhadap PPP secara demonstratif memilih hijrah ke Islam. Di Jawa Tengah misalnya dari 37 cabang NU yang ada, sampai bulan Mei hanya menyisakan 8 cabang saja yang masih jelas mendukung PPP. Pada umumnya mereka merasa bahwa kemengan PPP di suatu daerah selama ini tidak membawa dampak perbaikan apapun termasuk sarana keagamaan, malah yang banyak mengembangkan sarana keagamaan adalah Islam. KH. Ilyas Rukhyat menjelaskan bahwa yang selama ini menguntungkan NU adalah kerja sama dengan umara yang saat itu identik dengan Islam.

Di Jawa Timur, SK PBNU No. 72 tahun 1985 tentang pelarangan rangkap jabatan banyak ditafsirkan sebagai “perceraian” NU dari PPP, padahal SK tersebut sebenarnya adalah hanya melarang pengurus harian NU di semua tingkat merangkap kepengurusan organisasi politik. Akibat SK ini, hampir semua cabang PPP di Jawa Timur kesulitan mencari tenaga pengawas pemungutan suara dan panwaslak. Bahkan di Bondowoso, PPP kesulitan mencari orang untuk jabatan

komisaris. Para penggemboos terus melakukan gerakannya sehingga di dalam warga NU timbul kebencian terutama terhadap Jaleani Naro. Sehingga ulama NU yang aktif di PPP dianggap sebagai kaki tangan Naro. KH. Syamsuri Badawi menyesali dan menyalahkan PBNU atas segala pelarangan yang diberlakukan dan menganggap bisa menyesatkan umat. Ia tetap menganggap umat Islam wajib memilih PPP yang alasannya meski asas PPP telah menjadi Pancasila, AD/ARTnya masih mempergunakan Islam karena rumah Islam adalah PPP.

Dalam konteks dinamika internal seperti itu, KH. Achmad Siddiq dalam kapasitasnya yang saat itu menjabat sebagai Rais A'am di depan 250 ulama Jawa Timur memberikan fatwa mengenai pemilu. Dalam fatwa tersebut, KH. Achmad Siddiq tidak mewajibkan warga NU memilih PPP dan juga tidak melarang memilih Islam atau PDI. Selain itu, KH. Achmad Siddiq selaku Rais A'am mewajibkan warga menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serta mengharamkan menjadi Golput. Pada bulan Oktober fatwa tersebut dipublikasikan dalam sebuah buku kuning yang berjudul "NU dan Pemilu" yang disusun oleh A Zuhdi Muhdlor yang di cetak di Yogyakarta oleh PT Gunung Jati tahun 1986, dan diberikan pengantar oleh H. Saiful Mujab selaku wakil ketua PBNU saat itu. Buku kuning tersebut kemudian disebarakan kepada warga NU dan juga kepada 200 Bupati di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan yang wilayahnya merupakan basis massa NU.

Dalam konteks hubungan eksternal partai, implementasi Khittah dan fatwa ulama telah menyulitkan PPP terutama menjelang pemilu tahun 1987. Hal tersebut malah menguntungkan Golkar dan PDI. Berbagai pesantren yang menjadi basis kultural NU, menyatakan sikap berbondong-bondong meninggalkan PPP dan kemudian menuju Golkar dan PDI. Di Jawa Timur yang menjadi wilayah paling gencar dilakukannya penggemosan, mengakibatkan perolehan suara PPP menurun drastis dari 36,64% menjadi 20,72% sedangkan Golkar dan PDI mengalami kenaikan suara. Pada tingkat nasional pun, perolehan suara PPP juga mengalami hal demikian, dari sebelumnya 27,78% pada pemilu 1982 menjadi 16,03% suara. Sementara itu Golkar memperoleh kenaikan suara yang signifikan, dari 64,34% pada pemilu 1982 menjadi 72,99% pada pemilu 1987.¹⁸²

Menurut Andree Feillard, faktor NU bukan menjadi satu-satunya yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan kekalahan dan penurunan perolehan suara PPP. Pendapat tersebut nampaknya bisa terbukti dari fakta yang menjelaskan bahwa perolehan suara di wilayah minoritas NU seperti daerah Sumatra Barat dan Aceh mengalami penurunan dengan kehilangan masing-masing 19% dan 15,71% suara. Bagi para politisi NU, pemilu tersebut menjadi suatu kemenangan, namun juga suatu kekalahan karena NU hanya memperoleh 22 kursi di parlemen sementara Golkar memperoleh 299 kursi.¹⁸³

¹⁸² Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*, 170-179

¹⁸³ Andree Feillard dkk, *Gus Dur NU Dan Masyarakat Sipil*, 31.

Selain itu, faktor-faktor lain juga melemahnya suara PPP juga disebabkan adanya kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan ketua umum PPP yang otoriter, hilangnya identitas keislaman sejak asas tunggal, dan upaya gigih yang dilakukan oleh pemimpin Golkar, Sudarmono. Lebih spesifik lagi faktor-faktor lain yang menjadi penyebab menurunnya perolehan suara PPP menurut Andree Feillard adalah:

1. Kedua unsur PPP lainnya (Sarekat Islam dan Perti) juga telah memutuskan hubungan mereka dengan PPP.
2. MI sendiri juga terpecah menjadi dua kubu yang pro dan kontra dengan Naro.
3. Upaya-upaya kampanye Golkar baik dari sisi keuangan maupun keagamaan juga lebih besar dibandingkan tahun 1982. Upaya kampanye keagamaan yang dilakukan Golkar tersebut adalah dengan berusaha membangun citra yang lebih agamis melalui janji program-program keagamaannya.
4. Citra partai Islam menjadi lebih “sekuler” setelah penerapan asas tunggal.¹⁸⁴

PPP hanya menunjukkan kemajuannya di propinsi-propinsi yang mayoritas penduduknya beragama Kristen seperti, Timor Timor, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh perpindahan

¹⁸⁴ Andree Feillard, *NU Vis A Vis Negara*, 269-270.

penduduk atau hasil dari suara orang-orang yang belum lama memeluk Islam. Yang jelas suara masyarakat Islam tidak lagi menjadi milik PPP. Islamlah yang merupakan pemenang sebenarnya telah berhasil menjaring suara Islam politik.¹⁸⁵ Hal ini juga tidak terlepas dari dekatnya para pemimpin NU dengan pemerintah karena dukungan yang diberikan kepada NU (khususnya kubu Situbondo) dalam muktamar membuat kaum nahdliyyin yang merupakan mayoritas suara dalam masyarakat lebih cenderung memilih Golkar.

Setelah pemilu, Abdurrahman Wahid berada pada posisi yang serba salah ketika pemerintah menunjuknya sebagai anggota MPR. Penunjukan ini hampir tidak dapat ditolak tetapi sulit didalamaikan dengan tekad NU untuk tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi dia tidak mempunyai banyak pilihan selain ikut bergabung dibangku Golkar. Bisa dimengerti, ini memperkuat keberatan fraksi PPP di NU terhadap kepemimpinan Gus Dur. Dirasakan perdebatan mengenai khittah dan implikasi-implikasi politiknya harus dibuka kembali.¹⁸⁶

Meski hubungan NU dengan PPP semakin memburuk, akan tetapi berkat Gus Dur dengan pemerintah dan ABRI semakin membaik. ABRI, lebih dari pada unsur-unsur lainnya dalam rezim yang berkuasa. Bagi Gus Dur hubungan baik ini bukanlah sekedar alat untuk mempengaruhi pikiran di dalam tubuh militer dan kadang-kadang untuk memecahkan persoalan seandainya ada masalah lokal yang timbul. Akan tetapi hubungan baik ini juga memberikan masukan yang berguna

¹⁸⁵ Ibid., 270.

¹⁸⁶ Martin Van Bruinessen, 144.

bagi Gus Dur sehingga ia bisa menduga sejauh mana ia dapat mengkritik rezim yang berkuasa tanpa menimbulkan reaksi amarah. Hal ini di kemudian hari hal ini sangat berguna.¹⁸⁷

Gus Dur memilih untuk membina hubungan baik dengan Soeharto, namun dengan mempertahankan sikap kritisnya terhadap sejumlah masalah sosial. Misalnya, Gus Dur tetap bersuara lantang dalam kritiknya terhadap bagaimana pemerintah daerah menangani kontroversi proyek waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah yang didanai oleh Bank Dunia. Ia secara kuat juga membela minoritas etnis dan agama di Indonesia. Menjelang pemilu 1987, Gus Dur menjadi makin kritis terhadap PPP yang kini banyak dihuni oleh kaum modernis. Sebagai akibatnya, ia menerima kemarahan dari banyak kalangan konservatif dalam NU, yang menyesali keluarnya NU dari PPP dan justru telah berbuat banyak untuk mempererat hubungan baiknya dengan pemerintah. Dan terbukti, setelah pemilu 1987, ia dilantik sebagai anggota MPR, mewakili Golkar. Oleh karena MPR hanya bersidang 5 tahun sekali, maka pengangkatan Gus Dur sebagai anggota MPR itu memang simbolik, tetapi menurut Greg Barton justru simboliknya itu yang penting.¹⁸⁸ Bisa dianalogikan dengan kedekatannya dengan pemerintah, Gus Dur yang berposisi sebagai ketua NU lebih bisa membangun NU dengan tidak lagi ada kecuriaan seperti yang telah dialami NU politik sebelum muktamar Situbondo.

¹⁸⁷ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, 182.

¹⁸⁸ *Ibid.*, 183.